



Rancangan  
Awal

# RENCANA KERJA 2023

---

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

---

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah mempunyai arti strategis karena Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah setiap tahun. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

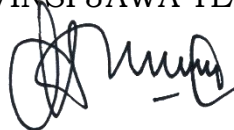
Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen renja ini.

Semarang,

2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TENGAH



HAERUDIN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700729 199603 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122  
SEMARANG – 50138

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2023.

Semarang, 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TENGAH

HAERUDIN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700729 199603 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
LEMBAR PERNYATAAN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud Dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 .....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra PD .....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	19
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	21
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	26
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	27
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	27
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD .....	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ....	30
BAB V PENUTUP .....	92

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.....	8
Tabel 2.2	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.....	15
Tabel 2.3	Analisis Kinerja Pelayanan PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.....	20
Tabel 2.4	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.....	25
Tabel 2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.....	26
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 .....	29
Tabel 4.1	Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah.....	31

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan OPD, sebagai implementasi dari pentahapan rencana strategis OPD. Renja-OPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2023. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja ( Renja ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan rencana tahunan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2018 – 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah senantiasa menyesuaikan diri untuk selaras dengan dinamika dan perubahan yang terus berkembang di Provinsi Jawa Tengah. Pada satu sisi, perkembangan tersebut merupakan sebuah peluang yang dapat bermanfaat bagi pembangunan wilayah. Namun pada sisi lain, sedikit banyak akan memunculkan berbagai permasalahan kompleks yang menuntut untuk dihadapi dan diselesaikan. Permasalahan yang menjadi isu strategis yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tseperti tumbuhnya paham radikalisme dan terorisme yang telah merambah ke lingkungan keluarga dan pelaku teror berasal dari generasi milenial, terganggunya stabilitas regional Jawa Tengah akibat konflik sara pada pembangunan proyek strategis nasional dan pengembangan kawasan industri yang dikembangkan di beberapa daerah, terjadinya konflik sosial dan

permasalahan toleransi didalam masyarakat pluralisme seperti di Jawa Tengah yang berbeda agama, etnis dan penghayat kepercayaan serta menguatkan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan adaptif terhadap masa depan society 5.0 yang menempatkan dinamika global teknologi dan humanisme sebagai instrumen kemajuan peradaban.

Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan program dan kegiatan secara terarah dan terpadu yang dapat memberi solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Khususnya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perencanaan program dan kegiatan dimaksud dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Rencana Kerja (RENJA) OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah ini merupakan dokumen perencanaan untuk menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023. Dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 telah ditetapkan kinerja yang akan dicapai untuk seluruh indikator kinerja juga ditetapkan nilai kuantitatif yang dijadikan dasar pengukuran keberhasilan pada akhir periode pelaksanaannya. Rencana Kerja menjelaskan berkaitan antara kegiatan dan sasaran, kebijakan dengan programnya, dan keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah senantiasa mengacu kepada peraturan Perundang-undangan atau landasan hukum yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020 - 2024
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 339/5267/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
26. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/0017371 tanggal 31 Desember 2021 tentang Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;

27. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.24/0002645 tanggal 9 Februari 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/kegiatan dalam rangka menacapai sasaran strategis.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah :

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Tengah

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan beserta indikator, target dan pagu indikatifnya untuk tahun 2023

## BAB V PENUTUP

Kesimpulan dari Rencana Kerja Tahun 2023

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022. Terkait dengan hal tersebut, Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah. Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan 6 (enam) program dan 9 kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 83.939.364.000,- terdiri dari :

1. Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut :
  - 1.1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan.
  - 1.3. Kegiatan Administrasi Umum.
  - 1.4. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan terdiri dari 1 kegiatan sebagai berikut :
  - 2.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik terdiri dari 1 kegiatan sebagai berikut :
  - 3.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik.
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dari 1 kegiatan sebagai berikut :

- 4.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri dari 1 kegiatan sebagai berikut :
  - 5.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dari 1 kegiatan sebagai berikut :
  - 6.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
8	Urusan Pemerintahan Umum							
8.01	Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik							
	02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks Ketahanan Ideologi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3.4				
			Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wasbang	90%		83%	91,14%	109,8
	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang paham tindakan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (%)	85%				
			Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%)	90%				
			Jumlah Kader Pancasila yang terbentuk	2.025 orang		100 orang	100 orang	100
			Jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila	5.100 orang		4.240 orang	4.240 orang	100
			Jumlah Masyarakat yang paham Wasbang dan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa	5.925 orang		160 orang	160 orang	100
			Jumlah Kader Gerakan Nasional Revolusi Mental yang terbentuk	3.055 orang		50 orang	50 orang	100
	03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3.3				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persentase masyarakat yang paham terhadap aspek-aspek IDI	90%		83%	90,12%	108,58 %
	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (%)	90,5%			
		Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik	90,5%				
		Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik	1 laporan				
		Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi	90,5%				
		Jumlah masyarakat yang ikut Sosialisasi penanganan dampak Pemilu/Pilkada	2.560 orang		50 orang	50 orang	100
		Jumlah Kader Partai Politik yang terdidik	1.960 orang		4.240 orang	4.240 orang	100
		Jumlah Pemilih Pemula yang ikut Pendidikan Politik	16.700 orang		280 orang	280 orang	100
		Jumlah Pengembangan Demokrasi di Jawa Tengah	1.900 orang		40 orang	40 orang	100
		Jumlah Parpol yang terkitab dalam pelatihan penatausahaan Bantuan Keuangan Parpol	2.000 orang		50 orang	50 orang	100
		Jumlah Fasilitasi Forkopimda	2.500 orang		135 orang	135 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Hasil Pendataan Parpol	175 laporan		35 laporan	35 laporan	100
		Jumlah Ormas dan Toma/ Toga yang ikut Penguatan Peran Politik	1.360 orang		10 orang	10 orang	100
		Jumlah Masyarakat yang ikut Pendidikan Politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD'45	16.600 orang		420 orang	420 orang	100
	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Ketahanan Ormas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3.11			
		Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa	90%		83%	88,01%	106,04 %
	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase penanganan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100%			
		Persentase masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	91,5%				
		Jumlah orang yang difasilitasi Pemberdayaan Ormas dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan	2.200 orang		85 orang	85 orang	100
		Jumlah Generasi Muda Lintas Agama dan Penghayat Kepercayaan yang difasilitasi	1.120 orang		100 orang	100 orang	100
		Jumlah Fasilitasi Gelar Seni dan Budaya Daerah	263 orang		8 orang	8 orang	100
		Jumlah pembinaan dalam rangka harmonisasi dan Kerukunan Antar Etnis serta Akulturasi Budaya	2.160 orang		400 orang	400 orang	100
		Jumlah pembinaan Etnisitas dengan Negara	1.120 orang		50 orang	50 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jumlah orang yang dilakukan pembinaan dalam rangka pemeliharaan keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan	1.920 orang		4120 orang	4120 orang	100
	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3.39			
		Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa	90%		83%	91,44%	110,17 %
	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase tindakan pencegahan dampak ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%			
		Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (	91,5%				
		Jumlah laporan fasilitasi/ Pembinaan/ Monev Bidang Ketahanan Ekonomi	385 orang		70 orang	70 orang	100
		Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pembinaan & Pengembangan Ketahanan Ekonom	6.570 orang		440 orang	440 orang	100
		Jumlah Kemitraan dengan ormas dalam rangka peningkatan kapasitas Masyarakat Bidang Ketahanan Ekonomi	130 orang		100 orang	100 orang	100
		Jumlah Kajian Strategik atas Pemetaan/Mapping Kondisi Ketahanan Bangsa di Jawa Tengah	39 laporan		4 laporan	4 laporan	100
	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Indeks Ketahanan Pertahanan dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	2.9			
		Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini	90%		83%	91,19%	109,87

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100%		100%	100%	100
	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					
		Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan	1 laporan				
		Persentase penanganan konflik sosial	100%				
		Jumlah Kader Resolusi Konflik yang terbentuk	6.900 orang		50 orang	50 orang	100
		Jumlah laporan deteksi dini	60 laporan		4 laporan	4 laporan	100
		Jumlah Unjuk rasa tertangani	400 orang		350 orang	280 orang	125
		Jumlah laporan konflik yang tertangani	726 laporan		46 laporan	53 laporan	115,22
		Jumlah Pemetaan/Mapping Potensi Konflik Sosial	5 laporan		1 laporan	1 laporan	100
		Jumlah kunjungan VIP/VVIP tertangani	83 kejadian		5 kejadian	5 kejadian	100
		Jumlah laporan konflik sosial	16 laporan		2 laporan	2 laporan	100
		Jumlah pantauan orang asing.	31.200 orang		2000 orang	7500 orang	375
		Jumlah masyarakat yang ikut dalam Penyelesaian konflik sosial.	2.480 orang		4.800 orang	5000 orang	104,17

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021					
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
0	00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100
					Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%		100%	100%	100
			1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	36 laporan				
					Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Politik Dalam Negeri	9.500 orang		920 orang	920 orang	100
					Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan	7.400 orang		100 orang	100 orang	100
					Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ketahanan Bangsa	4.600 orang		50 orang	50 orang	100
					Jumlah Capaian Program dan Kegiatan Dalam Perencanaan, Pengendalian, dan Pembinaan Kesbangpol	140 orang		35 orang	35 orang	100
					Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	50 laporan		10 laporan	10 laporan	100
					Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	50 laporan		10 laporan	10 laporan	100
			1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	1 laporan		12 bulan	12 bulan	100
			1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	1 laporan				
			1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	1200 orang		100 orang	100 orang	100
			1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	1 laporan				
			1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	1 laporan				
					Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	60 bulan		12 bulan	12 bulan	100
					Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	60 bulan		12 bulan	12 bulan	100
					Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan	60 bulan		12 bulan	12 bulan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kepegawaian perangkat daerah					
		Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	5 paket		3 paket	3 paket	100
		Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	60 bulan		12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	60 bulan		12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60 bulan		12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	5 laporan		1 laporan	1 laporan	100
		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan PeranJumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	60 bulan		12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	60 bulan		12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	60 bulan		12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah.	60 bulan		12 bulan	12 bulan	100
	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	1			
	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	1			

**Tabel 2.2.**  
**Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah**

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022		
							Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
8				Usuran Pemerintahan Umum					
	8.01			Bidang Usuran Kesatuan Bangsa dan Politik					
		02		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks Ketahanan Ideologi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3.4	3.14	3.14	100
			1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang paham tindakan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (%)	85	80	80	100
					Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%)	90	80	80	100
		03		PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3.3	3.1	3.1	100
			1.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (%)	90,5	89,5	89,5	100
					Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (%)	90,5	89,5	89,5	100
					Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik (laporan)	1	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022		
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi	90,5	89,5	89,5	100	
	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Ketahanan Ormas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3.11	2.92	2.92	100
	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase penanganan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100	100	100	100
			Persentase masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	91,5	90,5	90,5	100
	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3.39	3.23	3.23	100
	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase tindakan pencegahan dampak ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100	100	100	100
			Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (	91,5	90,5	90,5	100
	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Indeks Ketahanan Pertahanan dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	2.9	2.7	2.7	100
	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	85	75	75	100
0	00	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
				Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%	100%	100%
	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	36 laporan	36 laporan	36 laporan	100
	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	1	1 laporan	1 laporan	100
	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi	1	1 laporan	1 laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022		
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		pelayanan Perangkat Daerah					
	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	1	1 laporan	1 laporan	100
	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	1	1 laporan	1 laporan	100
	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	1	1 laporan	1 laporan	100
	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	1	1 laporan	1 laporan	100

Dari tabel di atas dapat disampaikan faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja pada program-program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Keberhasilan program ini dihasilkan dari kerjasama saling menguntungkan dan setara dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan elemen masyarakat lain yang memiliki kepedulian dan konsentrasi pada pembumian dan penguatan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Strategi kerjasama ini menghasilkan pelaksanaan kegiatan lebih masif dan cakupan yang lebih luas, walaupun dengan minimnya ketersediaan anggaran. Lebih jauh pola ini mendorong Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) berperan lebih besar dalam kemitraan dengan pemerintah daerah pada kegiatan pembumian Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan tetap berpegang pada tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang akan dicapai

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Dalam rangka adaptasi terhadap pandemi covid dan dorongan untuk membangun Pendidikan Politik Berbasis Online, Penatausahaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kegiatan Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat dilaksanakan secara hybrid yang menghadirkan 10 peserta secara luring disetiap kegiatan dan secara daring (zoom meeting dan youtube). Tampilan Kegiatan mengangkat tema-tema aktual dan penguatan partisipasi penanganan dampak pandemi oleh masyarakat, menyasar pemilih muda. Kegiatan FGD Penguatan Budaya Dan Etika Politik Masyarakat (NGOPI GASPOL “Ngobrol Pintar Gagas Politik”) mengangkat tema antara lain : Vaksinasi, Kolaborasi, Politik Generasi Muda dan Perempuan, Akses Ruang Publik yang Berkesetaraan dilaksanakan melibatkan Cipayung Plus, OMS, Komunitas, dan Aktivistis Demokrasi.

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dikemas dalam bentuk edukasi dan sosialisasi yang melibatkan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat telah berjalan efektif. Edukasi dan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat mengenai pentingnya hidup bersama dengan saling toleransi antar maupun inter agama, suku, etnis, membangun kebersamaan, solidaritas dan sense of crisis, serta bekerja bergotong royong menyelesaikan masalah Covid-19. Penyusunan Raperda Ormas diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih kepada Organisasi Kemasyarakatan dalam memberikan kontribusi yang nyata dan bermakna dalam setiap proses pembangunan. Ormas yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai bentuk dan orientasi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, perlu dipertimbangkan peran dan kontribusinya baik sebagai instrumen maupun strategi dalam pembangunan yang berbasis masyarakat

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Edukasi dan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat mengenai ketahanan ekonomi di daerah dan mengantisipasi terjadinya gejolak sosial

masyarakat yang diakibatkan adanya pandemi covid-19 sangat diperlukan guna mendongkrak roda perekonomian sehingga kondusifitas NKRI tetap terjaga. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi, mengembangkan ekonomi kreatif, dan meningkatkan daya saing produk unggulan daerah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.

#### 5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pemecahan masalah dengan melalui mufakat bersama, yang saling mempercayai dan saling terbuka untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi. Selain dengan keterlibatan masyarakat, penguatan Tim Terpadu dalam penanganan konflik sosial dan kerjasama serta koordinasi antara instansi terkait melalui Tim Kewaspadaan Dini Provinsi Jawa Tengah perlu dikuatkan lagi untuk mencegah dan menangani konflik sosial yang terjadi.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilaksanakan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target kinerjanya semuanya melebihi target yang telah ditetapkan. Pencapaian hasil realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat disampaikan sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Analisis Kinerja Pelayanan PD**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah**

No	Indikator	Target SPM	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa										
	Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	-	-	83			90,45				-
2	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap politik										
	Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	-	-	83			90,12				-
3	Meningkatnya ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik										
	Indeks ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-		3.12	3.35			3.35	3.46	-
4	Meningkatnya Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik										
	Indeks Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-		2.97	3.14			3.14	3.34	-

## **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

### **2.3.1. Kinerja Pelayanan OPD**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah merupakan institusi teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi pemerintahan dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan serta membangun sistem politik yang demokratis guna mewujudkan program pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat.

Pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2022 - 2023, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- b. Meningkatnya Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan 6 program dan 13 kegiatan.

### **2.3.2. Permasalahan yang Dihadapi**

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Provinsi Jawa Tengah pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tugas, pokok dan fungsi adalah :

1. Bidang ideologi dan Kewaspadaan Nasional:
  - a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;
  - b. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang bersifat anarkis;
  - c. Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan.
2. Bidang Ketahanan Bangsa:
  - a. Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba;
  - b. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat;
  - c. Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan;
  - d. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial;

### 3. Bidang Politik Dalam Negeri :

- a. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;
- b. Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat masih dibawah target nasional;
- c. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu;

#### 2.3.3. Tantangan dan Peluang

Adapun tantangan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah antara lain:

- a. Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, ke-bhineka-an, NKRI, demokratisasi, revolusi karakter bangsa dan restorasi sosial budaya serta stabilitas Jawa Tengah dalam rangka memantapkan ideologi dan wawsan kebangsaan;
- b. Belum tertatanya struktur politik, pemantapan budaya politik, dinamika politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan politik dalam negeri yang lebih demokratis;
- c. Masih terdapat konflik perebutan dalam pengelolaan sumber daya alam (termasuk pesisir) di masyarakat sebagai dampak meningkatnya kegiatan penggalian, pertambangan dan industri;
- d. Terdapat gejala menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam masyarakat.
- e. Masih adanya sikap diskriminatif dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas di masyarakat.
- f. Masih adanya aksi dan kegiatan terorisme atau kekerasan.

Dari tantangan diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah memiliki sejumlah peluang sebagai berikut:

- a. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Kesadaran masyarakat untuk menjaga eksistensi bangsa melalui peningkatan wawsan kebangsaan, penanganan konflik dan peningkatan kewaspadaan dini;
- c. Kesadaran dan partisipasi masyarakat Jawa Tengah dalam berpolitik saat ini terus tumbuh;
- d. Semakin kuatnya kelembagaan demokrasi sebagai penampung aspirasi masyarakat;
- e. Stabilnya sistem politik Jawa Tengah sehingga memberikan ruang bagi pengembangan sistem politik yang demokratis.

#### 2.3.4. Rekomendasi untuk Ditindaklanjuti

Untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di Jawa Tengah tersebut diperlukan solusi atau rekomendasi unuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun rekomendasi yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.
2. Memberikan pemahaman akan pentingnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat.
3. Melakukan sosialisasi terkait etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik, di masyarakat.
4. Meningkatkan Kinerja Pokja IDI untuk menyusun Rencana Aksi guna peningkatan skor IDI;
5. Peningkatan penggunaan Media Sosial dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila; partisipasi politik dan Wawasan Kebangsaan;
6. Melakukan koordinasi terhadap instansi terkait agar tidak terjadi kekerasan dan konflik di masyarakat, baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan upah, dan konflik lahan dan sumber daya alam.
7. Melakukan sosialisasi mengenai pendidikan politik kepada seluruh elemen masyarakat;
8. Koordinasi dan kerjasama antara Badan Penyelenggara Pemilu dan aparat terkait dalam rangka antisipasi isu negatif yang berkembang dalam menghadapi Pemilu Tahun 2024;
9. Perlu tindakan tegas terhadap pelaku dugaan money politic;
10. Koordinasi antara Badan Penyelenggara Pemilu dan instansi terkait mengenai jumlah DPT.
11. Pemerintah perlu menyediakan tempat bagi masyarakat untuk dapat berekspresi dengan bebas dan tertib tanpa mengganggu kenyamanan pihak lain;
12. Lebih memperhatikan fasilitas bagi kelompok disabilitas dan lansia
13. Kaderisasi yang baik dalam partai-partai politik sehingga dapat menghasilkan politisi-politisi yang berintegritas dan kompeten;
14. Koordinasi bersama Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, FKUB dan Ormas Keagamaan dalam menciptakan sikap toleransi.
15. Melakukan sinergitas dalam Penanganan Konflik Sosial dan Peningkatan Deteksi Dini dengan aparat keamanan seiring meningkatnya gangguan kamtibmas.
16. Melakukan sosialisasi P4GN dan PN

#### **2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari

Pemerintah Provinsi dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan provinsi.

Berikut Review terhadap Rancangan Awal RKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah :

**Tabel 2.4**

**Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 2023**

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Ideologi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3.4	3.449.050.000	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Ideologi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3.4	3.449.050.000	
B	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Ormas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3.11	8.425.000.000	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Ormas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3.11	8.425.000.000	
C	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3.39	5.420.000.000	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3.39	5.420.000.000	
D	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Pertahanan dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	2.9	16.696.400.000	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Pertahanan dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	2.9	16.696.400.000	
E	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3.3	27.339.818.000	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3.3	27.339.818.000	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan Musrenbang diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan provinsi. Melalui forum tersebut akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Namun usulan yang masuk terlalu banyak dari jumlah usulan dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan penelaahan dan prioritas terhadap usulan yang ada. Berikut Usulan Program/Kegiatan Masyarakat hasil telaah :

**Tabel 2.5**  
**Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
A.	HIBAH SOSIAL KEMASYARAKATAN				
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jawa Tengah	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ormas	3.220.000.000	Usulan Hibah Sosial Masyarakat
B.	HIBAH INSTANSI VERTIKAL				
1.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jawa Tengah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan	9.096.400.000	Usulan Hibah Instansi Vertikal yang terkait dengan Tupoksi Kesbangpol.
2.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jawa Tengah	Jumlah Laporan Pendataan Parpol	20.369.890.000	Usulan Hibah Instansi Vertikal yang terkait dengan Tupoksi Kesbangpol.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah secara struktural dibawah Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, untuk itu arah kebijakan dari pusat pada tahun 2023 yang sesuai dengan bidang politik dan pemerintahan umum antara lain :

1. Kerukunan ummat beragama di daerah;
2. Kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebhinekaan;
3. Kinerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di daerah;
4. Penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila;
5. Pengembangan kapasitas aparatur pusat dan daerah di bidang kewaspadaan dini dan deteksi dini;
6. Kewaspadaan dini dan deteksi dini di daerah;
7. Pendidikan politik dan Penguatan ideology Pancasila bagi Pengurus Partai Politik;
8. Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah;
9. Peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesbangpol dalam pelayanan pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
10. Pembinaan dan Pemberdayaan serta pengawasan organisasi kemasyarakatan;
11. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN);
12. Peningkatan efektivitas Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat di wilayah kerja masing-masing.
13. Dukungan sukses persiapan dan tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

Dari kebijakan nasional tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah merumuskan beberapa program prioritas pada tahun 2023 antara lain :

1. Pemetaan terhadap daerah rawan konflik sosial terutama konflik SARA dengan Penguatan Timdu PKS;
2. Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
3. Memperkuat sinergitas antar stakeholder guna pencegahan deradikalisasi;
4. Memberikan pemahaman dan mengajak ikut serta masyarakat untuk cegah dan deteksi dini terhadap paham radikalisme dan terorisme;
5. Pelaksanaan Perda P4GN dan PN melalui Penyusunan Pergub, Efektivitas Timdu P4GN dan PN serta Sosialisasi dan Penyuluhan Perda P4GN dan PN;
6. Pengawasan Ormas serta Penguatan Timdu Pengawasan Ormas;

7. Penguatan Peran dan Fungsi Forkopimda dalam menjaga kondusivitas wilayah Jawa Tengah;
8. Penguatan Peran Toga, Tomas dan Ormas dalam menjaga kerukunan umat beragama;
9. Pendidikan politik dalam rangka penguatan partisipasi politik terutama bagi pemilu pemula, perempuan dan kelompok rentan.
10. Peningkatan dan penguatan peran partai politik;
11. Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD**

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam kurun tahun 2022 – 2023 menetapkan tujuan sebagai berikut : ” Meningkatkan Ketahanan IPOLEKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik”.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2022 – 2023, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- b. Meningkatkan Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1****Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan dan Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1.	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	Persen	80
		1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	1. Nilai Kepuasan Masyarakat	Persen	80
		2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	78,44
2.	Meningkatnya Ketahanan IPOLEKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik		Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3.25
		1. Meningkatnya ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Indeks ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3.35
		2. Meningkatnya Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	2. Indeks Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3.15

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi SKPD dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah hanya melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik, sedangkan fungsi lain (perlindungan masyarakat) dilaksanakan oleh OPD pelaksana fungsi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah memiliki rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023, sebagai berikut :

**Tabel 4.1.**

**Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah**

**Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah									19,669,732,000		19.919.732.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	80		90		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah								3,603,462,000		3,603,462,000		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	78.44	3,603,462,000	82	3,603,462,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						3,603,462,000		3,603,462,000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	3,603,462,000	100	3,603,462,000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3,603,462,000		3,603,462,000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	36	3,603,462,000	36	3,603,462,000	SUB BAGIAN PROGRAM	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01. 1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2,645,782,000		2,645,782,000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	17	2,645,782,000	17	2,645,782,000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01. 1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				957,680,000		957,680,000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	Dokumen	21	957,680,000	21	957,680,000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah</b>								<b>16,066,270,000</b>		<b>16.316.270.000</b>		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	80	16,066,270,000	80	<b>16.316.270.000</b>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						16,066,270,000		16.316.270.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	16,066,270,000	100	16.316.270.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8,450,574,000		10,925,120,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	10,925,120,000	1	10,925,120,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10,700,000,000		10,700,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	10,700,000,000	12	10,700,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				222,120,000		222,120,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	222,120,000	12	222,120,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1,500,000		1,500,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	1	1,500,000	1	1,500,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1,500,000		1,500,000		
						Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat Daerah	Dokumen	1	1,500,000	1	1,500,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					80,000,000		80,000,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	80,000,000	1	80,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik				80,000,000		80,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Daerah SKPD								
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	80,000,000	12	80,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					320,500,000		320,500,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	320,500,000	1	320,500,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15,000,000		15,000,000		
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12	15,000,000	12	15,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.05			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				15,000,000		15,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah dokumen laporan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	15,000,000	1	15,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				60,000,000		60,000,000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	100	60,000,000	100	60,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				230,500,000		230,500,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	130	230,500,000	130	230,500,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1,196,806,000		1,310,650,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	1,196,806,000	1	1,310,650,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50,000,000		50,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	50,000,000	12	50,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200,000,000		200,000,000		
						Jumlah bulan penyediaan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	200,000,000	12	200,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				120,000,000		120,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	120,000,000	12	120,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				180,000,000		180,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	180,000,000	12	180,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				85,000,000		85,000,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan pengadaan kantor	Bulan	12	85,000,000	12	85,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				25,000,000		25,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	25,000,000	12	25,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				55,650,000		55,650,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	55,650,000	12	55,650,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500,000,000		500,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	500,000,000	12	500,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25,000,000		25,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12	25,000,000	12	25,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				70,000,000		70,000,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	1	70,000,000	1	70,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					305,000,000		305,000,000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	305,000,000	1	305,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas jabatan	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				70,000,000		70,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah paket pengadaan meubelair	Paket	1	70,000,000	1	70,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200,000,000		200,000,000		
						Jumlah paket pengadaan Peralatan dan Mesin	Paket	1	200,000,000	1	200,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35,000,000		35,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah paket Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Paket	1	35,000,000	1	35,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2,457,000,000		2,457,000,000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	2,457,000,000	1	2,457,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7,000,000		7,000,000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	7,000,000	12	7,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				350,000,000		350,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	350,000,000	12	350,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2,100,000,000		2,100,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	2,100,000,000	12	2,100,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					668,000,000		918.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	668,000,000	1	918.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			225,000,000		225,000,000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	225,000,000	12	225,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel			3,000,000		3,000,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	3,000,000	12	3,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				120,000,000		120,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	120,000,000	12	120,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250,000,000		500,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	250,000,000	1	500,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				70,000,000		70,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	70,000,000	12	70,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>Meningkatnya Ketahanan IPOLEKSOS BUDHANKA MBidang Kesatuan Bangsa dan Politik</b>									<b>61.330.268.000</b>		<b>62.027.260.800</b>		
						Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3.25	61.330.268.000	3,4	62.027.260.800		
<b>Meningkatnya Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik</b>									<b>13.845.000.000</b>		<b>13.845.000.000</b>		
						Indeks Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3.15	13.845.000.000	3,34	13.845.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						8,425,000,000		8,425,000,000		
						Indeks Ketahanan Ormas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3.11	8,425,000,000	3,37	8,425,000,000		
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					8,425,000,000		8,425,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	%	91.5	3,600,000,000	92	3,600,000,000		
		8.01.04.1 .01.03			Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				3,600,000,000		3,600,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah masyarakat yang mengikuti mediasi sengketa ormas dan pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Orang	500	600,000,000	500	600,000,000		
						Jumlah masyarakat yang mengikuti pemberdayaan ormas dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan	Orang	4000	3,000,000,000	4000	3,000,000,000		
						Persentase penanganan pengawasan organisasi kemasyarakatan	%	100	4,825,000,000	100	4,825,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.04.1.01.01			Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				50,000,000		50,000,000		
						Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas yang tersusun	Dokumen	1	50,000,000	1	50,000,000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.04.1 .01.04			Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				775,000,000		775,000,000		
						Jumlah Laporan Hasil Desk dan Verifikasi Ormas	Laporan	7	300,000,000	7	300,000,000		
						Jumlah Laporan pemberdayaan dan pengawasan ormas	Laporan	6	475,000,000	6	475,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.04.1 .01.05			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				4,000,000,000		4,000,000,000		
						Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ormas	Laporan	35	4,000,000,000	35	4,000,000,000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						5,420,000,000		5,420,000,000		
						Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3.39	5,420,000,000	3,55	5,420,000,000		
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					5,420,000,000		5,420,000,000		
						Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)	%	91.5	3,665,000,000	92	3,665,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.05.1.01.03			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				3,665,000,000		3,665,000,000		
						Jumlah Masyarakat yang mengikuti Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan (orang)	Orang	300	809,000,000	300	809,000,000		
						Jumlah Masyarakat yang mengikuti Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika (orang)	Orang	500	756,000,000	500	756,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pembinaan & Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (orang)	Orang	3000	2,100,000,000	3000	2,100,000,000		
						Prosentase tindakan pencegahan dampak ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	100	1.755.000.000	100	1.755.000.000		
		8.01.05.1.01.01			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				225,000,000		225,000,000		
						Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Laporan	1	225,000,000	1	225,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.05.1.01.02			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				405,000,000		405,000,000		
						Jumlah Kajian Strategik atas Pemetaan/ Mapping Kondisi Ketahanan Bangsa (laporan)	Laporan	1	405,000,000	1	405,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.05.1.01.04			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				640,000,000		640,000,000		
						Jumlah laporan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan (laporan)	Laporan	1	210.000.000	1	210.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (laporan)	Laporan	1	430.000.000	1	430.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.05.1.01.05			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				485.000.000		485.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi/ Pembinaan/ Monev Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (laporan)	Laporan	1	485.000.000	1	485.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						16,696,400,000		16,696,400,000		
						Indeks Ketahanan Pertahanan dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	2,9	16,696,400,000	3,1	16,696,400,000		
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					16,696,400,000		16,696,400,000		
						Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (laporan)	Laporan	1	12,346,400,000	1	12,346,400,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.06.1.01.01			Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				50,000,000		50,000,000		
						Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Kewaspadaan Nasional yang tersusun (dokumen)	Laporan	1	50,000,000	1	50,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.06.1.01.04			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				900,000,000		900,000,000		
						Jumlah laporan kunjungan VIP/VVIP (laporan)	Laporan	1	700,000,000	1	700,000,000		
						Jumlah laporan pantauan kunjungan orang asing (laporan)	Laporan	1	200,000,000	1	200,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.06.1.01.05			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				9,796,400,000		9,796,400,000		
						Jumlah Dukungan Pengamanan Tahapan Pemilu dan Pilpres/Kepala Daerah	Laporan	1	300,000,000	1	300,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan (laporan)	Laporan	1	9,496,400,000	1	9,496,400,000		
		8.01.06.1.01.06			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				1,600,000,000		1,600,000,000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Forkopimda (laporan)	Laporan	1	1,600,000,000	1	1,600,000,000		
						Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%)	%	85	2,700,000,000	90	2,700,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.06.1.01.03			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				2,700,000,000		2,700,000,000		
						Jumlah Masyarakat yang mengikuti fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (orang)	Orang	3000	2,100,000,000	3000	2,100,000,000		
						Jumlah Masyarakat yang mengikuti peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini (orang)	Orang	380	600,000,000	380	600,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase penanganan konflik sosial (%)	%	100	1,650,000,000	100	1,650,000,000		
		8.01.06.1.01.02			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1,000,000,000		1,000,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah kajian perumusan Penanganan Konflik Sosial (laporan)	Laporan	60	1,000,000,000	60	1,000,000,000		
		8.01.06.1.01.04			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			650,000,000		650,000,000			
						Jumlah laporan deteksi dini (laporan)	Laporan	1	250,000,000	1	250,000,000		
						Jumlah laporan penanganan konflik sosial (laporan)	Laporan	3	400,000,000	3	400,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	<b>Meningkatnya ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik</b>								<b>30.788.868.000</b>		<b>31.485.860.800</b>		
						Indeks ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3.35	30.788.868.000	3,46	31.485.860.800		
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						2,985,500,000		3,449,050,000		
						Indeks Ketahanan Ideologi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3.4	3,449,050,000	3,6	3,449,050,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					3,449,050,000		3,449,050,000		
						Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%)	%	90	2,674,181,000	95	2,674,181,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.02.1 .01.03			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				2,520,000,000		2,520,000,000		
						Jumlah Masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan generasi muda lintas etnis (orang)	Orang	100	105,000,000	100	105,000,000		
						Jumlah Masyarakat yang mengikuti pendidikan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (orang)	Orang	3350	2,415,000,000	3350	2,415,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.02.1 .01.04			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				154,181,000		154,181,000		
						Jumlah Laporan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Prov dan Kab/Kota (laporan)	Laporan	1	121,181,000	1	121,181,000		
						Jumlah laporan Pembinaan Etnisitas dengan negara (laporan)	Laporan	1	33,000,000	1	33,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Prosentase masyarakat yang paham tindakan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (%)	%	85	774,869,000	90	774,869,000		
		8.01.02.1.01.01			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan , Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				50,000,000		50,000,000		
						Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Ideologi yang tersusun (dokumen)	Laporan	1	50,000,000	1	50,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.02.1.01.03			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				422,068,000		422,068,000		
						Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan dan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (orang)	Orang	400	422,068,000	400	422,068,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.02.1.01.04			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				9,750,000		9,750,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan deradikalisasi terhadap eks napter dan masyarakat rentan (laporan)	Laporan	1	9,750,000	1	9,750,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.02.1.01.05			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				293,051,000		293,051,000		
						"Jumlah Laporan Monev Bidang Bidang Ideologi dan Pembauran Kebangsaan (laporan)"	Laporan	1	293,051,000	1	293,051,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						27.339.818.000		28.036.810,800		
						Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3.3	27.339.818.000	3.33	28.036.810,800		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					27.339.818.000		28.036.810,800		
						Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik (laporan)	Laporan	1	21.757.490.000	1	21.931.738.200		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.03.1.01.01			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				50,000,000		50,000,000		
						Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Politik Dalam Negeri yang tersusun (dokumen)	Laporan	1	50,000,000	1	50,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.03.1.01.04			<p>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik,</p> <p>Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>				722.900.000		820.000.000		
						Jumlah laporan Perkembangan Demokrasi di Jawa Tengah (laporan)	Laporan	1	722.900.000	1	820.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.03.1.01.05			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				20.984.590.000		21.061.738.200		
						Jumlah laporan pelaksanaan bantuan partai politik (laporan)	Laporan	1	284.840.590.000	1	327.074.100		
						Jumlah Laporan Pendataan Parpol (laporan)	Laporan	1	20,699.750.000	1	20,734.664.100		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (%)	%	90.5	945.000.000	91,5	1.119.248.200		
		8.01.03.1.01.03			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				945.000.000		1.119.248.200		
						Jumlah anggota parpol yang mengikuti pelatihan pemahaman keterbukaan informasi publik (orang)	Orang	160	250.000.000	160	270.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah anggota parpol yang mengikuti pelatihan penatausahaan bantuan keuangan partai politik (orang)	Orang	320	445.000.000	320	550.000.000		
						Jumlah kader parpol yang mengikuti pendidikan demokrasi dan etika budaya politik (orang)	Orang	160	250.000.000	160	270.000.000		
						Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (%)	%	90,5	3.235.308.000	91,5	3.409.556.200		
		8.01.03.1.01.03				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			3.235.308.000		3.409.556.200		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah masyarakat media/pers yang mengikuti pendidikan demokrasi dan etika budaya politik	Orang	100	150.000.000	100	170.000.000		
						Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan dan demokrasi dan etika budaya politik (orang)	Orang	3640	3.085.308.000	3640	3.239.556.200		
						Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (%)	%	90.5	1.402.020.000	91,5	1.576.268.200		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.03.1.01.02			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				200.000.000		250.000.000		
						Jumlah kajian strategik pengembangan politik dan demokrasi di Jawa Tengah (laporan)	Laporan	1	200.000.000	1	250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.03.1.01.03			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				785.000.000		840.000.000		
						Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi sistem dan implementasi politik (orang)	Orang	320	654.400.000	320	660.000.000		
						Jumlah perguruan tinggi yang terlibat dalam kemitraan pengembangan demokrasi (kab/kota)	Kabupaten/Kota	240	130.600.000	240	180.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.03.1.01.05			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				417.020.000		486.268.200		
						Jumlah laporan situasi dan kondisi politik dan demokrasi di Jawa Tengah (laporan)	Laporan	1	417.020.000	1	486.268.200		
<b>TOTAL ANGGARAN 2023</b>									<b>81.000.000.000</b>				

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 merupakan rencana pelaksanaan tahun kelima penyelenggaraan pemerintahan, yang disusun secara sinergis dan berkesinambungan dengan pertimbangan tugas dan fungsi organisasi. Sebagai suatu dokumen perencanaan, rencana kerja ini merupakan pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun dalam penyusunan dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023.

Dalam rangka mengoptimalkan rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, maka setiap unit pada lingkup Badan Kesbangpol yang secara langsung bertanggung jawab terhadap rencana kegiatan tersebut, dan berkewajiban untuk menuangkan rencana kegiatan tersebut ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu RKA maupun DPA. Selain itu, pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan, setiap pengelola kegiatan maupun penanggung jawab kegiatan perlu melaksanakan pengendalian secara periodik melalui pelaporan, monitoring dan evaluasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dan diiringi peran aktif stakeholder yang ada di Provinsi Jawa Tengah antara lain Instansi Vertikal, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ormas/LSM, Partai Politik dan Aparat Keamanan. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.